



Vol 25, No. 1 (2026)

Research Article

Pemikiran Soekarno Tentang Relasi Islam dan Negara Melalui Teks-Teks Kuliah Umum, 1958-1959

Fanisa Aura

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: fanisaaaura24@mhs.uinjkt.ac.id/fanisaaaura7@gmail.com

Submitted: Apr 13, 2026; Reviewed: May 18, 2026; Accepted: Jun 1, 2026

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemikiran Soekarno tentang relasi Islam dan negara melalui teks-teks kuliah umum pada tahun 1958–1959. Studi ini berfokus pada bagaimana Soekarno memandang Islam bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi sebagai kekuatan moral, sosial, dan revolusioner yang mampu menyatu dengan semangat kebangsaan. Dalam kuliah-kuliah umumnya, Soekarno menekankan nilai-nilai keadilan sosial, gotong royong, serta semangat anti-penindasan yang terkandung dalam Islam, sekaligus menolak gagasan negara Islam formal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan teori analisis wacana Norman Fairclough dengan pendekatan komunikasi politik yang digunakan untuk melihat bagaimana pesan dan pembentukan pemahaman tersampaikan kepada pembaca melalui teks. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks-teks kuliah umum yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1958-1959. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Soekarno berusaha mengaitkan antara negara, Islam, dan budaya lokal, serta prinsip universal demokrasi menjadi satu kesatuan dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara.

Keywords: Pemikiran Soekarno; Islam; Negara; Kemanusiaan

Abstract: This research examines Soekarno's thoughts on the relationship between Islam and the state drawing on his public lectures from 1958-1959. The study focuses on how Soekarno viewed Islam not only as a ritual religion, but as a moral, social, and revolutionary force capable of merging with the spirit of nationality. In his public lectures, Soekarno emphasized the values of social justice, cooperation, and the spirit of anti-oppression contained in Islam, while rejecting the idea of a formal Islamic state. The method used in this research is the historical method with four stages, namely, heuristics, verification, interpretation, and historiography. This research uses Norman Fairclough's discourse analysis theory with a political-communication approach used to see how messages and the formation of understanding are conveyed to readers through text. The primary sources

used in this research are the texts of public lectures delivered by President Soekarno in 1958-1959. The results of the study show that Soekarno's thoughts tried to link the State and Islam, local culture, and the universal principles of democracy into a unity within the framework of Pancasila as the basis of the state.

Keywords: *Soekarno's Thought; Islam; the State; Humanity*

PENDAHULUAN

Perjalanan panjang sejarah Indonesia tidak terlepas dari para tokoh yang terlibat dan berperan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Salah satunya adalah Ir. Soekarno yang dijuluki sebagai Bapak Proklamator dan diakui sebagai tokoh sentral yang tak pernah selesai menjadi pembahasan. Terlebih, banyak hal menarik yang bahkan terkadang menjadi kontroversial dalam kehidupan pribadinya, pergulatan politiknya, ataupun pemikiran-pemikirannya. Soekarno dikenal sebagai tokoh penggerak nasionalisme dan paling bertentangan dengan kolonialisme serta imperialisme. Pemikirannya tidak hanya seputar aspek ekonomi, sosial, dan politik saja, akan tetapi pandangannya mengenai Islam juga sangat dominan. Kombinasi keilmuan Soekarno telah membawanya pada dua pendirian mengenai Islam, yaitu liberal dan progresif, sehingga dia menekankan pentingnya wacana pembebasan dalam Islam.¹

Pemikirannya mengenai Islam melalui berbagai tuntunan karya-karya Islam, salah satunya adalah buku *The New World of Islam* karya Lothrop Stoddart.² Wacana dan pandangan mengenai pemikirannya mengenai Islam mulai berkembang saat menjalin hubungan dan berkomunikasi melalui surat dengan Ahmad Hasan pada saat di Ende, Flores. Tidak hanya sampai di sana, Soekarno melanjutkan pembelajarannya mengenai Islam saat dia pindah ke Bengkulu dan secara resmi tergabung dalam Perserikatan Muhammadiyah tahun 1938. Pemikirannya juga berpegang teguh pada relasi antara Islam dan negara yang terinspirasi melalui gerakan Pan-Islamisme Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani dalam mengamalkan nilai-nilai Islam terhadap perjuangan mereka dalam melawan pengaruh Barat. Hal tersebut terlihat pula dalam teks-teks kuliah umum yang Soekarno sampaikan di berbagai Universitas, bagaimana dia menyampaikan pemikirannya mengenai relasi Islam dan Negara.³

Dalam kuliah umum yang disampaikan oleh Soekarno, terdapat konsepsi mengenai relasi Islam dengan negara yang menjelaskan bahwasanya Soekarno menegaskan bahwa Islam merupakan bagian dari kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai keadilan sosial, gotong royong dan semangat anti penindasan, bukan hanya sebagai ritual. Berdasarkan pemaparannya, Soekarno menolak adanya gagasan mengenai adanya negara Islam secara formal, menurutnya harus ada dasar kebangsaan yang dalam hal ini adalah Pancasila agar seluruh agama atau golongan seperti, Islam, Hindu, Budha, Katolik dan aliran kepercayaan lainnya dapat terwakili. Soekarno melihat Islam bukan sebagai pemecah, melainkan semangat kebangsaan. Akan tetapi, negara tidak boleh hanya dikuasai oleh satu agama saja. Secara keseluruhan, kuliah umum oleh Presiden Soekarno ini menekankan

¹ Badri Yatim, *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 14–15.

² Lothrop Stoddart, *The New World of Islam* (New York: Cornell University Library, 1921).

³ Bernard Dahm, *Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 214–15.

Pancasila sebagai sintesis antara nilai-nilai agama, budaya lokal dan prinsip universal demokrasi dan keadilan.⁴

Pemikiran Soekarno menolak formalisasi Islam sebagai dasar negara. Soekarno mengkritik gagasan negara Islam karena dianggap tidak sesuai dengan pluralitas Indonesia dan berpotensi memecah persatuan nasional. Dia melihat bahwa negara harus berdiri di atas kesepakatan kebangsaan, bukan dominasi agama tertentu. Pemikiran Soekarno tentang relasi Islam dan negara bukanlah bentuk sekularisme, melainkan ijtihad politik yang menempatkan Islam sebagai sumber etika dalam kerangka negara nasional berbasis Pancasila.⁵ Nasionalisme adalah fondasi utama pemikiran Soekarno dan nasionalisme Soekarno bersifat inklusif serta mengakomodasi Islam secara nonformal. Sedangkan, Pancasila adalah bentuk institusionalisasi relasi Islam dan negara versi Soekarno.⁶

Sejarah pemikiran tidak terlepas dari kajian teks, baik teks-teks tersebut berbentuk buku, makalah, artikel dan lain sebagainya yang pernah ditulis oleh pelaku sejarah tersebut. Dalam hal ini, penulis mengkaji teks-teks mengenai kuliah umum Presiden Soekarno dalam berbagai kesempatan seperti, kuliah kehormatan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, Yogyakarta pada tanggal 20 September 1952, kursus Presiden Soekarno di Istana Negara tentang Pancasila tanggal 26 Mei 1958, 16 Juni 1958, 5 Juli 1958, 22 Juli 1958, 3 September 1958⁷, dan 21 Februari 1959⁸, di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 1958⁹, serta Pembukaan Studium Generale Gabungan Mahasiswa Bandung pada tanggal 11 Oktober 1959.¹⁰

Selama ini studi tentang pemikiran Soekarno lebih banyak berfokus pada nasionalisme, hubungan internasional atau mengenai bagaimana Soekarno membahas tentang Pancasila. Dalam pembahasan ini, penulis berfokus pada kajian teks-teks kuliah umum oleh Presiden Soekarno pada tahun 1958-1959 untuk memberikan penjelasan mengenai gagasan Soekarno akan posisi Islam sebagai kekuatan moral, sosial dan revolusioner yang dapat menyatu dengan semangat kebangsaan tetapi tidak secara formal yang kemudian diringkas dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Artikel jurnal ini mengkaji mengenai pemikiran Soekarno tentang relasi Islam dan negara telah menjadi bagian penting dalam historiografi politik Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada perdebatan konstitusional tahun 1945, polemik seputar Piagam Jakarta, maupun Manifesto Politik 1959. Penelitian ini memilih untuk menyoroiti kuliah umum Soekarno pada tahun 1958–1959, karena pada

⁴ Soekarno, “Kuliah Kehormatan Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Jogjakarta,” (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 20 September 1952), 7.

⁵ Budiarti, “Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018), 4-5.

⁶ Muhammad Soleh Aminullah, “Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno Tentang Relasi Agama Dan Negara,” *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020), 8.

⁷ “Kuliah Kehormatan Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Jogjakarta.”

⁸ Soekarno, “Kuliah Umum Tentang Pancasila di depan Para Peserta Seminar Pancasila dan Para Mahasiswa,” (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 21 Februari 1959).

⁹ Soekarno, “Tugas dan Peranan Mahasiswa dalam Revolusi Nasional: Kuliah Umum Presiden Soekarno di depan Para Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, Mei 1958).

¹⁰ Soekarno, “Kuliah Umum Presiden Soekarno Pada Pembukaan Studium Generale bagi Gabungan Mahasiswa Bandung”, (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, Oktober 1959).

periode ini Soekarno tengah berupaya meneguhkan Demokrasi Terpimpin sekaligus membingkai kembali posisi Pancasila dan agama dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, kuliah umum tersebut merupakan sumber primer yang kaya untuk menelusuri bagaimana Soekarno merumuskan relasi Islam dan negara di tengah situasi politik yang dinamis. Dalam konteks ini, istilah relasi Islam dan negara dipahami sebagai interaksi gagasan mengenai syariat, identitas umat, dan posisi agama dalam sistem politik nasional.

Literatur mengenai Islam dan politik di Indonesia banyak menyoroti dinamika hubungan antara negara dan umat Islam pada masa Orde Lama. Chiara Formichi, misalnya, dalam *Islam and the Making of the Nation*¹¹ menekankan bagaimana wacana Islam senantiasa dinegosiasikan dalam proyek kebangsaan Indonesia OAPEN Library. Kajian-kajian lain yang diterbitkan oleh ISEAS dan Oxford University Press menguraikan bahwa relasi Islam dan negara pada periode ini ditandai oleh tarik-menarik antara sekularisme Pancasila dengan aspirasi politik Islam. Literatur ini memberikan kerangka kontekstual untuk membaca kuliah umum Soekarno sebagai bagian dari percaturan ideologi nasional yang lebih luas. Beberapa studi menekankan bahwa kuliah umum Soekarno pada periode 1958–1959 menampilkan konsistensi argumentatif dalam menempatkan Pancasila sebagai “philosophische grondslag” yang melampaui kepentingan politik sektoral. Dengan demikian, teks kuliah umum dapat dilihat sebagai laboratorium retorika politik Soekarno yang memperlihatkan sintesis antara ideologi kebangsaan, agama, dan demokrasi terpimpin.¹²

Teori yang digunakan dalam penelitian artikel jurnal ini adalah teori analisis wacana Norman Fairclough dengan menggunakan pendekatan komunikasi-politik. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana teks-teks tersebut mampu menggambarkan konteks sosial, politik, historis dan ideologi. Untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi, didistribusikan dan dipahami oleh para pembaca sehingga dapat menangkap pesan dari apa yang melatarbelakangi teks tersebut. Dalam hal ini, analisis wacana digunakan untuk melihat pandangan atau pemikiran Soekarno melalui retorika atau kalimat yang digunakan serta argumentasinya mengenai Negara dan Islam. Pendekatan komunikasi-politik sebagai sudut pandang bagaimana tindakan komunikatif tersebut sebagai tindakan untuk membangun pengaruh, legitimasi dan dukungan terhadap suatu gagasan dan tujuan politiknya. Dalam kuliah umum Soekarno, para pendengarnya adalah mahasiswa dan tentu saja dia berperan sebagai pembentuk opini publik berdasarkan gagasan atau argumen yang dibawa olehnya. Hal tersebut secara otomatis terkemas dalam pesan kepada para pendengar mengenai pemikirannya saat itu.¹³

Dari literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai relasi Islam dan negara pada era Soekarno relatif banyak, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji kuliah umum Soekarno pada 1958–1959 sebagai rujukan utama. Kebanyakan penelitian berhenti pada analisis pidato kenegaraan atau perdebatan konstitusional, sehingga dimensi akademis dan retorik dalam kuliah umum masih terabaikan. Selain itu, belum ada studi yang menelusuri wacana kuliah umum tahun 1958 dan 1959, padahal

¹¹ Chiara Formichi, *Islam and the Making of the Nation* (Leiden: KITLV Press, 2012).

¹² *Islam and the Making of the Nation*, 3.

¹³ Aris Badara, *Analisis Wacana: Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Wacana Media* (Prenada Media, 2014), 10.

periode ini sangat penting menjelang lahirnya Dekrit Presiden 1959. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah menghadirkan analisis wacana yang menggabungkan studi teks, retorika, dan pesan politik dalam menelaah pemikiran Soekarno tentang relasi Islam dan negara melalui teks kuliah umum 1958–1959.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Pemikiran Soekarno

Soekarno merupakan seorang proklamator bangsa Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Dia memiliki kemampuan yang diakui oleh khalayak umum, dibuktikan dengan banyaknya gelar kehormatan yang diperoleh olehnya dari berbagai universitas di belahan dunia. Soekarno lahir di Blitar, 6 Juni tahun 1901, dan merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya merupakan keturunan dari Sultan Kediri yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya merupakan keponakan dari Raja Singaraja yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya merupakan keturunan Islam, sedangkan ibunya terdapat keturunan Hindu-Bali.¹⁴

Soekarno menduduki Sekolah Dasar di Inlande School, Tulungagung hanya sampai kelas lima, kemudian pindah ke Europeesche Lagere School (ELS), Mojokerto atas permintaan ayahnya. Setelah lulus dari sekolah tersebut, Soekarno melanjutkan jenjang pendidikannya di Hoogere Burgerschool (HBS), Surabaya, dibantu oleh Tjokroaminoto yang pada saat itu menjabat sebagai presiden Sarekat Islam dan memimpin gerakan nasional Indonesia. Pada saat itu, Soekarno tinggal dengan Douwes Dekker, Agus Salim, Muso, Tjipto Mangunkusumo dan beberapa tokoh lainnya di rumah HOS. Tjokroaminoto. Beranjak dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Technische Hoogeschool (THS), Bandung dan mendirikan Studieclub di sana. Sejak saat itu, Soekarno mulai terlibat aktif dalam pergerakan nasional dan kelompok belajar dengan kemampuan enam bahasanya.¹⁵

Pemikiran Soekarno mengenai Islam dan negara tidak dapat dilepaskan dari pengalaman intelektual dan politik yang membentuk pandangan dunianya sejak masa pergerakan nasional. Sebagai tokoh yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang plural, Soekarno memperoleh pengaruh dari berbagai tradisi pemikiran, mulai dari nasionalisme, Islam, hingga sosialisme. Ketika tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya pada masa remajanya, dia berinteraksi dengan berbagai tokoh pergerakan dan mulai mengenal gagasan-gagasan pembaruan Islam yang berkembang pada awal abad ke-20. Pengalaman tersebut memperluas wawasannya mengenai posisi agama dalam perjuangan politik dan kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁶

Selain dipengaruhi oleh lingkungan Sarekat Islam, pemikiran Soekarno juga dibentuk oleh bacaan-bacaannya mengenai nasionalisme Eropa, gerakan antikolonial di Asia, dan pemikiran sosialisme. Berbagai pengaruh tersebut mendorongnya untuk mencari sintesis ideologis yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Upaya tersebut tampak jelas dalam tulisannya “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” yang menekankan pentingnya kerja sama antara kekuatan nasionalis, Islam, dan sosialis dalam menghadapi

¹⁴ Budhi Wuryanto and Budiman Sudjatmiko, *Soekarno Muda* (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), 10.

¹⁵ Argawi Kandito, *Soekarno: Leadership Secrets of Soekarno* (Depok: ONCOR, 2021), 43.

¹⁶ Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2018), 49.

kolonialisme.¹⁷ Bagi Soekarno, perpecahan ideologis hanya akan melemahkan perjuangan bangsa, sedangkan persatuan antargolongan merupakan syarat utama bagi terwujudnya kemerdekaan Indonesia.

Soekarno dengan semangat kemerdekaannya tentu saja membuat resah para penjajah, bahkan dirinya sampai dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi, di sanalah Soekarno bertemu dengan suasana dan orang-orang baru, terlebih dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Saat dirinya diasingkan di Pulau Ende, Soekarno lebih mendalami Islam dan menghasilkan berbagai surat yang disebut sebagai Surat-Surat Islam dari Ende. Isinya mengenai pandangan Soekarno terhadap keadaan Islam dan umatnya pada saat itu, mulai dari permasalahan sosial, pendidikan Islam, hingga politik negara. Soekarno memang telah mempelajari Islam sejak tinggal bersama dengan Tjokroaminoto. Dia terpengaruh oleh pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Ahmad Hasan serta membaca dan mempelajari berbagai buku Islam yang ditulis oleh para sarjana Muslim ataupun hasil karya Orientalis.¹⁸

Dalam bidang keislaman, Soekarno tidak memperoleh pendidikan agama formal yang mendalam sebagaimana tokoh-tokoh Islam modernis pada zamannya. Namun, ia secara aktif mempelajari Islam melalui diskusi dan korespondensi dengan tokoh-tokoh pembaru Islam, terutama Ahmad Hassan dari Persatuan Islam (Persis). Melalui surat-surat yang ditulisnya selama masa pembuangan di Ende, Soekarno menunjukkan ketertarikannya terhadap penafsiran Islam yang rasional dan progresif. Ia mengkritik praktik taklid serta mendorong pembukaan kembali pintu ijtihad agar umat Islam mampu menjawab tantangan zaman modern.¹⁹ Pandangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi gagasannya bahwa Islam harus dipahami secara dinamis dan tidak boleh dipisahkan dari perkembangan masyarakat.

Pengalaman menghadapi kolonialisme Belanda turut membentuk pandangan politik Soekarno mengenai negara. Menurutnya, negara Indonesia yang merdeka harus mampu menjadi wadah pemersatu seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan agama, suku, maupun golongan. Oleh karena itu, ketika perdebatan mengenai dasar negara mengemuka pada masa kemerdekaan hingga era Demokrasi Liberal, Soekarno cenderung menolak gagasan negara agama dan lebih mendukung negara nasional yang memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara setara.²⁰ Akan tetapi, sikap tersebut tidak berarti bahwa ia menolak peran agama dalam kehidupan publik. Sebaliknya, Soekarno memandang Islam sebagai sumber nilai moral yang penting bagi pembangunan bangsa dan pembentukan karakter masyarakat Indonesia.

Karya Soekarno yang terkenal adalah buku *Di Bawah Bendera Revolusi* yang terdiri dari dua jilid. Buku tersebut merupakan kumpulan tulisan Soekarno yang dihimpun dari pemikiran-pemikirannya dan menjadi rujukan penting jika ingin mengenalinya. Dalam jilid pertamanya Soekarno menekankan tentang Nasionalisme sebagai semangat pemersatu untuk melawan penjajahan, persatuan nasional diatas perbedaan agama dan suku yang mencoba mempersatukan ideologi Nasionalis, Islam dan Sosialis menjadi kekuatan untuk

¹⁷ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I* (Jakarta: Banana Books, 2016), 23.

¹⁸ St. Sularto, *Dialog Dengan Sejarah: Soekarno Seratus Tahun* (Jakarta: Kompas, 2001), 295.

¹⁹ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, 335.

²⁰ Bernard Dahm, *Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 309.

melawan kolonialisme, menolak adanya imperialisme dan kapitalisme serta adanya gagasan awal mengenai Pancasila yang nilai-nilai universalnya cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.²¹ Sedangkan, dalam jilid duanya Soekarno lebih menyoroti revolusi, konsepnya mengenai Demokrasi Terpimpin dengan menganut aliran Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) serta adanya strategi revolusi mental dan kemanusiaan.²²

Soekarno tidak hanya menuliskan isi pemikirannya melalui surat-surat yang ditulis olehnya menggunakan pena, menuangkan isi pemikirannya dalam berbagai surat kabar dan menghasilkan suatu karya berupa buku. Pemikiran Soekarno juga terlihat dari pidato, orasi dan kuliah umum yang beliau berikan di berbagai universitas. Hal tersebut tentu saja menjadi salah satu cara yang efektif untuk turut menyebarkan pemikirannya terkait Nasionalisme hingga Pancasila. Dalam hal ini, mahasiswa atau kalangan akademisi menjadi bagian strategis dalam menyebarkan ide-ide mengenai revolusi serta generasi muda yang menjadi target utamanya. Kuliah umum ini juga bisa saja merupakan wadah untuk menyebarkan strategi politik yang dibungkus dalam pendidikan secara massif.

Tipologi Teks-Teks Kuliah Umum Soekarno Berdasarkan Konteks Historisnya

Teks-teks kuliah umum Soekarno yang disampaikan pada tahun 1958–1959 tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons terhadap dinamika politik dan intelektual Indonesia pada akhir era Demokrasi Parlementer. Masa tersebut ditandai oleh ketidakstabilan politik, perdebatan mengenai dasar negara, serta menguatnya upaya Soekarno untuk merumuskan kembali arah kehidupan berbangsa melalui konsep Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks demikian, teks-teks kuliah umum yang menjadi objek penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yakni teks yang membahas persoalan Islam dan teks yang membahas persoalan negara. Pembagian ini dilakukan untuk memudahkan pembacaan terhadap konstruksi pemikiran Soekarno mengenai relasi antara agama dan kekuasaan politik.

Kelompok pertama adalah teks-teks tentang Islam. Dalam kategori ini, Soekarno menempatkan Islam sebagai agama yang memiliki dimensi sosial dan historis yang luas, melampaui batas-batas ritual keagamaan. Islam dipahami sebagai kekuatan moral yang mampu mendorong kemajuan masyarakat dan menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa. Melalui kuliah-kuliah umumnya, Soekarno berupaya menjelaskan bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan dapat berdialog dengan tuntutan modernitas. Konteks historis kemunculan teks-teks ini berkaitan erat dengan perdebatan yang berlangsung sejak masa Konstituante mengenai posisi Islam dalam negara Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan Islam dalam pidato-pidato Soekarno tidak hanya ditujukan kepada kalangan umat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari upayanya membangun pemahaman mengenai kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dan cita-cita kebangsaan Indonesia.

Sejarah panjang dari perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945 tidak lantas membuat Presiden Soekarno dan para pendiri bangsa Indonesia tenang begitu saja. Mereka tetap berusaha mencari sistem

²¹ Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I* (Jakarta: Banana Books, 2016).

²² Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II* (Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1964).

pemerintahan atau politik yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tentu saja diupayakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam misi pencarian tersebut, Indonesia sedang menerapkan sistem demokrasi liberal atau parlementer yang mengadopsi gaya Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, secara tidak langsung sistem ini mendukung adanya multipartai yang kemudian mendorong kesempatan bagi masyarakat untuk membentuk partai dan memicu pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Terbentuklah Undang-Undang Pemilu pada tahun 1953 dan pemilu secara resmi untuk pertama kalinya terselenggara di Indonesia pada tahun 1955.²³

Diselenggarakannya pemilu tersebut tentu saja memiliki tujuan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan suatu badan yang disebut sebagai Badan Konstituante. Tugas dari badan tersebut adalah untuk merumuskan dan menentukan Undang-Undang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Dalam pemilu tersebut terdapat 34 partai dan dimenangkan oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Selama kurang lebih sembilan tahun menerapkan sistem parlementer, dimana kekuasaan tertinggi berada di kabinet, sedangkan Presiden hanya sebagai kepala negara. Sistem tersebut sudah menghasilkan beberapa kabinet diantaranya, Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali I, Burhanuddin Harahap, Ali II dan Juanda pada kisaran tahun 1951 sampai dengan tahun 1959. Tentu saja dalam hal ini peran Soekarno menjadi sangat terbatas, terlebih dalam setiap pengambilan keputusan. Posisi tersebut yang kemudian mendorong Soekarno untuk melakukan reformasi sistem.²⁴

Pada tahun 1950 hingga tahun 1957 terjadi krisis politik yang mengharuskan Soekarno mengambil langkah untuk menentukan arah gerak dan sistem baru dalam menjalankan pemerintahan. Pada tahun 1957, Soekarno mulai membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari empat puluh lima anggota. Orang-orang tersebut dihimpun dari berbagai golongan yang diantaranya seperti, pejabat sipil, militer, menteri dan orang-orang yang mengerti akan persoalan daerah dan tentu saja orang-orang yang dianggap perlu. Akan tetapi, dalam proses pembentukan sistem pemerintahan yang baru terlihat adanya persaingan antara Partai Komunis Indonesia (PKI), militer dan Soekarno untuk mempertahankan posisi mereka masing-masing. Dalam hal ini, Soekarno cenderung berkiblat pada partai tunggal dan menghilangkan pengaruh Barat yang didukung oleh PKI, sedangkan kalangan militer yang diwakili oleh A.H. Nasution berusaha menghimpun kekuatan politiknya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Pemuda Anshor.²⁵

Pada tahun 1957 pula, disaat yang bersamaan terjadi gejolak di berbagai daerah atau gerakan separatis yang didasari oleh kepentingan politik. Beberapa diantaranya seperti, PRRI dan Permesta, kemudian dibentuknya DI/TII sebagai gerakan yang menginginkan dibentuknya negara Islam. Gerakan ini kurang lebih memiliki satu tujuan yaitu, menolak adanya PKI atau kontra dengan PKI dan Soekarno. Tidak hanya itu, adanya perdebatan Badan Konstituante pada tahun yang sama mengenai putusan tentang adanya Undang-Undang baru dalam menggantikan UUDS masih saja terhenti dalam tiga pilihan besar yaitu,

²³ Harun Al-Rasjid, *Sekitar Proklamasi, Konstitusi Dan Dekrit Presiden* (Jakarta: Pelita Ilmu, 1968), 32.

²⁴ Dahimatul Afidah and Abdul Ghofi Dwi Setiawan, "Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara Hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959," *Historia Madania* 7, no. 1 (2023): 5.

²⁵ M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 391.

agama, sosial-ekonomi dan Pancasila. Melihat perselisihan yang semakin memanas, Soekarno merespon hal tersebut dengan mengambil langkah untuk mengganti kabinet baru yaitu, Juanda. Hal tersebut dilakukan untuk membuat sebuah program baru yang membentuk Dewan Perancang Nasional untuk menormalisasi keadaan NKRI. Hal ini juga menandakan peran Soekarno dalam pengendalian politik karena Dewan tersebut diketuai oleh Soekarno secara langsung.²⁶

Keberlanjutan dari perumusan undang-undang baru pada akhirnya menghasilkan pilihan dan terdapat perbedaan dari berbagai golongan. Ada yang mendukung sistem ekonomi-sosialis, golongan yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan golongan yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, ideologi Islam didukung oleh NU, Masyumi, PSII dan golongan partai Islam kecil lainnya, ideologi Pancasila didukung oleh PKI, PNI, Partai Katolik dan beberapa partai lainnya, sedangkan ideologi ekonomi-sosialis didukung oleh kalangan orang-orang yang berafiliasi dengan partai nasionalis dan partai buruh. Tentu saja hal ini masih memicu perdebatan, walaupun mayoritas golongan mendukung ideologi Pancasila. Akan tetapi, masih ada saja yang bersikeras agar ideologi negara diharuskan Islam, seperti Natsir. Perdebatan tersebut diakhiri dengan pidato Soekarno yang menandakan lahirnya Pancasila.²⁷

Kelompok kedua adalah teks-teks tentang negara. Kategori ini mencakup pidato-pidato yang menyoroti persoalan kebangsaan, dasar negara, demokrasi, persatuan nasional, dan arah pembangunan politik Indonesia. Teks-teks tersebut lahir dalam situasi krisis politik yang ditandai oleh kegagalan sistem parlementer, konflik antar kekuatan politik, serta ancaman disintegrasi nasional. Dalam konteks tersebut, Soekarno memandang negara sebagai instrumen utama untuk mewujudkan persatuan bangsa dan mencapai tujuan revolusi Indonesia. Negara tidak ditempatkan sebagai entitas yang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai wadah bersama yang mampu mengakomodasi keragaman masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, gagasan-gagasan mengenai negara yang muncul dalam kuliah umum Soekarno sering kali dikaitkan dengan upaya membangun integrasi nasional dan memperkuat legitimasi politik menuju Demokrasi Terpimpin.

Menindaklanjuti perdebatan dari berbagai golongan tersebut yang pada akhirnya menuai banyak protes, hal itu menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang terjadi hingga tahun 1959. Presiden Soekarno harus mengeluarkan Dekrit Presiden yang bertepatan pada tanggal 5 Juli tahun 1959 untuk menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut seperti, Badan atau Lembaga Konstituante yang tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, munculnya gerakan separatis dari berbagai daerah, desakan dari berbagai golongan yang menuai protes tak kunjung usai serta percobaan untuk membunuh Soekarno dan membubarkan PKI. Inti pokok dari Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno merupakan pembubaran Badan Konstituante, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pembentukan Dewan

²⁶ Subhan Rizki Dayani, Tati Rohayati, and Ahmad Maftuh Sujana, "Pemberontakan PRRI Dan Permesta: Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama (1957-1958)," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 8.

²⁷ Abdurakhman, "Benturan Tak Berujung: Studi Interaksi Nasionalis Islam Dan Nasionalis Sekuler 1908-1959" (Universitas Indonesia, 2004), 84.

Petimbangan Agung. Dekrit tersebut juga merupakan peralihan sistem dari parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin.²⁸

Kebuntuan dalam Konstituante 1956–1959, sebagaimana dijelaskan oleh Herbert Feith, mencerminkan konflik ideologis yang tajam antara kelompok Islam dan nasionalis dalam menentukan dasar negara. Dalam konteks inilah, kuliah umum Soekarno pada periode 1958–1959 dapat dipahami sebagai respons strategis dan ideologis untuk mengatasi kebuntuan tersebut, dengan menegaskan kembali Pancasila sebagai titik temu antara Islam dan negara.²⁹ Daniel S. Lev menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, institusi Islam seperti peradilan agama berada dalam kerangka kontrol negara, sehingga mencerminkan pola integrasi terbatas antara Islam dan negara. Dalam konteks ini, pemikiran Soekarno sebagaimana tercermin dalam kuliah umum 1958–1959 dapat dipahami sebagai upaya konseptual untuk menegaskan model relasi tersebut, di mana Islam tetap diakomodasi tanpa menjadi dasar struktural negara.³⁰

Meskipun dapat dibedakan secara analitis ke dalam dua kategori tersebut, teks-teks mengenai Islam dan negara pada dasarnya saling berkaitan. Dalam pandangan Soekarno, Islam merupakan sumber nilai moral yang penting bagi kehidupan bangsa, sedangkan negara berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam masyarakat yang majemuk. Hubungan keduanya tidak dipahami dalam kerangka subordinasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan sebagai relasi yang saling menopang dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pengelompokan teks-teks kuliah umum ke dalam kategori Islam dan negara bertujuan untuk menunjukkan konteks historis yang melatarbelakangi lahirnya gagasan-gagasan tersebut sekaligus memudahkan analisis terhadap pemikiran Soekarno mengenai relasi Islam dan negara pada periode 1958–1959.

Teks Kuliah Umum sebagai bagian dari Pemikiran Soekarno Mengenai Relasi Islam dan Negara

Nasionalisme Soekarno berperan sebagai kerangka utama dalam membentuk relasi Islam dan negara, di mana Islam tidak diposisikan sebagai ideologi negara, melainkan sebagai sumber nilai yang terintegrasi dalam Pancasila. Melalui kuliah umum 1958–1959, Soekarno secara konsisten mendorong transformasi politik Islam dari orientasi formal menuju substansial, guna menjaga integrasi nasional dalam masyarakat yang plural.³¹ Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno sering kali mengisi kuliah umum di berbagai Universitas. Tidak jarang beliau mengeluarkan pemikirannya dan kaitannya dengan kondisi pada saat itu. Pada kuliah umumnya di Universitas Gadjah Mada tahun 1958, Soekarno menyinggung soal revolusi dan bagaimana revolusi di Indonesia yang menurutnya merupakan revolusi nasional dalam arti menyatu dengan revolusi politik dan

²⁸ “Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara Hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959.”

²⁹ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Equinox Publishing, 2006), 66-72.

³⁰ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions* (California: University of California Press, 1972), 83.

³¹ Ferdi Yufriadi, Donna Ramadhan Fitri, and Abdullah A Afifi, “The Influence of Sukarno’s Nationalism on the State and Islamic Politics in Indonesia,” *Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1, no. 2 (2023): 39–41.

agama. Soekarno juga kerap memberikan pengertian dan analogi mengenai revolusi yang dimaksud, seperti kutipan berikut:

"Nabi Mohammad S.A.W. atau Nabi lain-lain, mereka mengadakan revolusi agama daripada sesuatu alam pikiran keagamaan. Misalnja sesuatu bangsa yang tadinya menyembah berhala atau menjembah dewa-dewa jang banjak, diberikan kepada bangsa itu pengertian yang baru sehingga bangsa itu mengalami perubahan jang menjembah misalnja Tuhan yang Esa"³²

Soekarno dengan pemikirannya juga menyerukan mengenai anti-imperialisme dan mendirikan suatu negara nasional yang berisikan beberapa cita-cita bangsa. Beliau menekankan bahwa tujuan bangsa Indonesia bukan hanya terbatas pada mencapai kemerdekaan saja, melainkan membentuk suatu negara yang benar-benar merdeka serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Soekarno juga memiliki strategi mengenai revolusi mental yang merupakan hubungan antara sistem dengan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Soekarno juga tidak jarang menyinggung soal Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam Indonesia hingga buku Islam dan Sosialisme yang ditulis oleh Tjokroaminoto. Beliau memperjelas bahwa itu bukan hanya sekadar buku, akan tetapi isinya adalah perjuangan yang dirinya pun sepakat dengan isinya.

"Sarikat Islam memperdjuangkan agama Islam dan memperdjuangkan sosialisme. Almarhum Tjokroaminoto pernah menulis buku dan bukan sadja menulis buku tapi memperdjuangkan isi buku itu, jang namanja Islam dan Sosialisme."³³

Dalam kuliah umumnya, Soekarno juga sering kali membahas mengenai kemanusiaan yang harus saling mencintai manusia-manusia lainnya, bukan hanya sebagai suatu bangsa, tetapi terhadap manusia-manusia di negara lainnya. Hal ini sesuai dengan Pancasila yang digagas olehnya yaitu, peri kemanusiaan. Menurutny, suatu masyarakat yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang toleran terhadap berbagai perbedaan dan generasi muda tidak boleh lengah dengan tantangan sosial-internasional. Soekarno juga menyinggung perihal komunisme yang juga menjadi bagian besar dari negara Indonesia karena mereka juga menghendaki keadilan sosial dan merdeka seratus persen. Bahkan dirinya juga memberikan pandangan serta makna mengenai demokrasi-sosialisme, bahwasanya sosialisme juga memiliki beberapa aliran seperti, sosialisme religius yang menghendaki sosialisme atas dasar-dasar agama.

Dalam berbagai kesempatan perkuliahannya, Soekarno juga menjelaskan mengenai Demokrasi Terpimpin dimana seorang Presiden memiliki konsepsi tersendiri dan tentu saja membubarkan partai-partai. Kemudian membentuk satu kabinet yang tidak memiliki keberpihakan kepada golongan mana pun. Soekarno kemudian menegaskan bahwasanya Demokrasi Terpimpin ini merupakan demokrasi penyelenggaraan guna mencapai cita-cita

³² "Kuliah Umum Presiden Soekarno Pada Pembukaan Studium Generale Bagi Gabungan Mahasiswa Bandung," 5.

³³ "Tugas Dan Peranan Mahasiswa Dalam Revolusi Nasional: Kuliah Umum Presiden Soekarno Didepan Para Mahasiwa Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta," 7.

Negara Republik Indonesia (NKRI) serta demokrasi kerja terutama dalam bidang sosial yang pada akhirnya dapat mencapai masyarakat adil dan makmur. Menurutnya, jika kita tetap berada dalam sistem liberalisme, maka kita akan berlaku semau-maunya. Sedangkan, liberalisme ini terkesan seperti buah pertengkaran antara partai-partai dan ini sistem yang buruk.

“Meskipun diadakan dua ribu Soekarno dan dua ribu Moh. Hatta dan dua ribu pemimpin-pemimpin lain, kalau masanja dalam kalbunja tidak bertjita-tjitakan seperti jang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin itu, tidak bisa masa itu bergerak.”³⁴

Selain konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin, Islam dan Sosialisme yang Soekarno bahas, dalam kuliah umumnya Pancasila juga menjadi buah pemikirannya tentang apa yang dia cita-citakan untuk mencapai masyarakat adil makmur yang selalu digaungkan olehnya. Terdapat kuliah umum di Bandung dan kursus di Istana Negara dengan tema Pancasila. Dalam penyampaian, Soekarno menyoroti pemaknaan Pancasila berdasarkan sila-sila yang tertera, dirinya meyakini bahwasanya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya dapat disatukan dengan Pancasila untuk melawan bekas-bekas Imperialisme. Menurutnya, cara ini sudah disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia karena tidak ada bangsa yang berjuang yang sama. Setiap bangsa memiliki karakteristiknya sendiri. Soekarno juga telah menyebutkan istilah Marhaen dalam perkuliahan ini yang merujuk kepada buruh, tani, pegawai pedagang, nelayan dan sejenisnya.

“Marhaen itu meliputi semua, PKI ada Marhaen, Masyumi ada Marhaen, Nadhlatul Ulama ada Marhaen, Gerwani ya ada Marhaen. Marhaen di dalam arti rakyat Indonesia dari segala golongan kecil itu tadi, yang tidak bisa diberikan nama kepadanya proletar.”³⁵

Soekarno juga memberikan analogi terkait Pancasila yang dikaitkan dengan agama Islam, Pancasila sudah digali dalam sekali dan disesuaikan dengan bangsa Indonesia, bukan hanya dengan Islam. Akan tetapi, hal ini bukan untuk mengesampingkan Islam, tapi agar seluruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kelima hal tersebutlah yang dihasilkan dari penggaliannya sejak zaman Hindu-Buddha hingga masuknya Islam ke Indonesia yaitu, Ketuhanan, Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial. Dalam bernegara ini formulasi ‘Tuhan yang Maha Esa’ ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan semua golongan agama di Indonesia. Jika elemen ketuhanan dihilangkan, tidak ada yang dapat mempersatukan batin bangsa Indonesia, sebab kepercayaan kita terhadap Tuhan merupakan dasar yang utama untuk menjadi suatu bangsa yang mengejar kebajikan dan kebaikan. Oleh karena itu, di dalam Pancasila elemen Ketuhanan ini dimasukan dengan nyata dan tegas serta sebagai elemen teratas.³⁶

³⁴ “Kuliah Umum Presiden Soekarno Pada Pembukaan Studium Generale Bagi Gabungan Mahasiswa Bandung.”

³⁵ Penerbitan Chusus, “Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila Di Istana Negara,” September 26, 1958, 19.

³⁶ “Kuliah Umum Tentang Pancasila Di Depan Para Peserta Seminar Pancasila Dan Para Mahasiswa.”

"Saya beragama Islam. Saya tidak berkata saya ini orang Islam yang sempurna. Tidak. Tetapi saya Islam. Dan saya menolak tuduhan bahwa saya menggali ini kurang dalam. Penggalan saya itu sampai zaman sebelum adanya agama Islam."³⁷

Mengenai kebangsaan, Soekarno menegaskan bahwasanya ada perbedaan yang tegas antara Negara dan Agama. Dalam aspek politik ataupun agama, faktanya masyarakat atau umat manusia ini memang sudah diciptakan secara beragam, ras, suku dan agama. Agama bercita-cita untuk menyatukan atau menjalin persaudaraan, akan tetapi negara merupakan urusan yang lain. Dalam hal ini, negara adalah suatu alat perjuangan yang diorganisir oleh wilayah-wilayah dan tentu ada manusianya. Tujuan dari penjelasannya adalah untuk merealisasikan Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, agama boleh saja tidak meyakini atau bahkan tidak mengenal kebangsaan, akan tetapi negara harus mempertimbangkannya untuk mencapai kesejahteraan karena kunci dari kebangsaan adalah persatuan, walaupun berbeda agama.

"Pihak agama kadang-kadang tidak bisa mengadakan batas yang tegas antara ini adalah agama, ini adalah kenegaraan. Negara tidak boleh dan tidak harus mempunyai wilayah, agama tidak. Adakah negara tanpa wilayah? Tidak ada! Negara harus mempunyai wilayah, agama tidak memerlukan teritor. Tidak ada satu negara, meskipun negara itu dinamakan negara Islam, tanpa teritor."³⁸

Dalam pemahamannya, Pancasila merupakan representasi antara Negara dan Islam karena dalam Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan seluruh pemikiran dari berbagai pendapat dan golongan, membuang kepentingan antar golongan maupun kelompok. Pancasila tidak hanya digunakan sebagai ideologi guna untuk mempersatukan, akan tetapi sebagai dasar serta pandangan hidup bangsa Indonesia.³⁹ Hal ini untuk membangun masyarakat baru di Indonesia yang disebut sebagai masyarakat sosialis Indonesia. Sejak ditetapkannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila oleh Soekarno dan dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959 sebagai respon atas permasalahan-permasalahan yang ada, semakin dapat dipahami logika atas pemikiran Soekarno yang sebagian besar dibangun berdasarkan pengalaman sejarah kehidupan bangsa Indonesia.⁴⁰

George McTurnan Kahin menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia berkembang sebagai ideologi pemersatu dalam masyarakat yang plural, di mana Islam memainkan peran penting namun tidak dominan secara struktural. Dalam konteks ini, pemikiran Soekarno sebagaimana tercermin dalam kuliah umumnya dapat dipahami sebagai kelanjutan dari upaya historis untuk mensintesis Islam dan nasionalisme dalam kerangka negara

³⁷ Soekarno, "Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila," (Istana Negara), June 16, 1958, 10.

³⁸ Soekarno, "Pancasila Sebagai Dasar Negara III: Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila," (Istana Negara), July 5, 1958.

³⁹ Paisol Burlan, "Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila," *Doctrinal* 5, no. 2 (2020): 144.

⁴⁰ "Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila Di Istana Negara."

Pancasila.⁴¹ Nurcholish Madjid menekankan dalam bukunya *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* bahwa Islam seharusnya dipahami sebagai sumber nilai etis yang universal, bukan sebagai ideologi negara formal. Dalam kerangka ini, pemikiran Soekarno juga menunjukkan kecenderungan serupa, yakni menempatkan Islam dalam posisi substantif sebagai landasan moral bagi negara Pancasila, tanpa menjadikannya sebagai dasar struktural negara.⁴²

KESIMPULAN

Pembahasan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa pemikiran Soekarno mengenai relasi Islam dan negara bersumber dari pergulatan intelektual, historis, dan politik yang panjang. Melalui teks-teks kuliah umumnya pada tahun 1958–1959, Soekarno berusaha membangun fondasi ideologis bagi kehidupan berbangsa yang tidak memisahkan agama dari negara, tetapi juga tidak menjadikan agama sebagai dasar formal kenegaraan. Baginya, Islam harus menjadi kekuatan moral dan sosial yang menjiwai perjuangan nasional serta menjadi landasan etika dalam penyelenggaraan negara. Soekarno menafsirkan Islam sebagai agama yang mengandung nilai-nilai keadilan sosial, gotong royong, dan anti-penindasan. Dirinya menolak Islam dipersempit dalam bentuk ritual semata, melainkan dipahami sebagai energi pembebasan yang relevan dengan perjuangan bangsa Indonesia.

Soekarno memberikan pandangan kritis terhadap formalisasi negara Islam dalam diskursus modern serta menegaskan bahwa pendirian negara Islam tidak sesuai dengan realitas sosiologis Indonesia yang majemuk. Negara yang ideal bagi Indonesia adalah negara kebangsaan yang berdasar pada Pancasila, yang dapat menaungi seluruh golongan dan agama. Pancasila sebagai sintesis ideologis. Pancasila dipahami Soekarno sebagai hasil sintesis dari nilai-nilai Islam, tradisi lokal, dan prinsip universal kemanusiaan. Ia menjadi bentuk kompromi kreatif yang mampu mengintegrasikan cita-cita nasionalisme, religiusitas, dan demokrasi sosial dalam satu kerangka ideologis. Dengan demikian, pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa relasi Islam dan negara dalam pandangan Soekarno bersifat dialektis dan integratif, bukan antagonis. Islam tidak dipisahkan dari kehidupan politik, namun dihadirkan dalam bentuk nilai-nilai etik, sosial, dan kemanusiaan yang sejalan dengan cita-cita nasional. Pemikiran ini menegaskan posisi Soekarno sebagai tokoh yang mampu menggabungkan spiritualitas Islam, rasionalitas politik, dan kepribadian bangsa Indonesia dalam satu kerangka ideologi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurakhman. "Benturan Tak Berujung: Studi Interaksi Nasionalis Islam Dan Nasionalis Sekuler 1908-1959." Universitas Indonesia, 2004.

Argawi Kandito. *Soekarno: Leadership Secrets of Soekarno*. Depok: ONCOR, 2021.

⁴¹ George McTuman Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (SEAP Publications, 2003), 50-53.

⁴² Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan* (Mizan Pustaka, 2008), 32-35.

- Badara, Aris. *Analisis Wacana: Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Prenada Media, 2014.
- Budhi Wuryanto, and Budiman Sudjatmiko. *Soekarno Muda*. Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- Budiarti. "Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i1.995>.
- Chiara Formichi. *Islam and the Making of the Nation*. Leiden: KITLV Press, 2012.
- Cindy Adams. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2018.
- Dahm, Bernard. *Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Dahimatul Afidah, and Abdul Ghofi Dwi Setiawan. "Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara Hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959." *Historia Madania* 7, no. 1 (2023).
- Dahm, Bernard. *Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Daniel S. Lev. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. California: University of California Press, 1972.
- Ferdi Yufriadi, Donna Ramadhan Fitri, and Abdullah A Afifi. "The Influence of Sukarno's Nationalism on the State and Islamic Politics in Indonesia." *Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1, no. 2 (2023): 39–41.
- George McTuman Kahin. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. SEAP Publications, 2003.
- Harun Al-Rasjid. *Sekitar Proklamasi, Konstitusi Dan Dekrit Presiden*. Jakarta: Pelita Ilmu, 1968.
- Herbert Feith. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing, 2006.
- Ir. Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta: Banana Books, 2016.
- — —. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*. Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
- Lothrop Stoddart. *The New World of Islam*. New York: Cornell University Library, 1921.
- M. C. Ricklef. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Muhammad Soleh Aminullah. "Agama Dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno Tentang Relasi Agama Dan Negara." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.

- Nurcholish Madjid. *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan*. Mizan Pustaka, 2008.
- Paisol Burlian. "Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila." *Doctrinal* 5, no. 2 (2020): 144.
- Soekarno. *Kuliah Kehormatan Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Jogjakarta*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 20 September 1952.
- — —. *Kuliah Umum Presiden Soekarno pada Pembukaan Studium Generale bagi Gabungan Mahasiswa Bandung*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, Oktober 1959.
- — —. *Kuliah Umum Tentang Pancasila di Depan Para Peserta Seminar Pancasila dan Para Mahasiswa*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 21 Februari 1959.
- — —. "Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila Di Istana Negara." September 26, 1958.
- — —. *Tugas dan Peranan Mahasiswa dalam Revolusi Nasional: Kuliah Umum Presiden Soekarno di Depan Para Mahasiswa Universitas Gadjah Mada*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, Mei 1958.
- Soekarno. "Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila." (Istana Negara), June 16, 1958.
- — —. "Pancasila Sebagai Dasar Negara III: Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila." (Istana Negara), July 5, 1958.
- St. Sularto. *Dialog Dengan Sejarah: Soekarno Seratus Tahun*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Subhan Rizki Dayani, Tati Rohayati, and Ahmad Maftuh Sujana. "Pemberontakan PRRI Dan Permesta: Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama (1957-1958)." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025).
- Yatim, Badri. *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985